

PENANGANAN KASUS-KASUS MORAL DI INDONESIA

PERSPEKTIF ISLAM

Oleh: Marzuki, M.Ag.*

Abstract

Di Indonesia, permasalahan moral dari hari ke hari semakin bertambah, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Berbagai kasus moral terus menghiasi berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang semakin membudaya, pelanggaran HAM, pelecehan seksual, pornografi, pelacuran, dan penyalahgunaan narkoba menjadi permasalahan yang terkesan biasa di mata masyarakat kita sekarang, bukan sesuatu yang luar biasa dan mengejutkan lagi.

Upaya-upaya untuk memberantas (minimal mengurangi) kasus-kasus moral tersebut terus dilakukan oleh pemerintah (aparatur berwajib) maupun masyarakat kita, namun hasilnya belum memuaskan. Dibuatnya undang-undang yang mengatur masalah tersebut serta keberadaan lembaga-lembaga negara yang menangani kasus-kasus tersebut ternyata belum menjadi “senjata ampuh” yang dapat menghentikan bangsa kita dari tindak pelanggaran moral tersebut. Upaya alternatif yang bisa ditempuh di antaranya adalah melakukan gerakan besar-besaran yang melibatkan semua golongan atau elemen dalam masyarakat, baik yang tergabung dalam partai-partai politik, organisasi massa, LSM maupun perkumpulan-perkumpulan lainnya, untuk memberantas kasus-kasus moral yang ada yang dimotori oleh kepemimpinan yang bersih dan berwibawa dari para elite kita. Semangat jihad bagi kalangan Muslim juga menjadi “ruh” yang dapat menjadi pemicu dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut. Alternatif lain yang juga sangat penting adalah melalui pendidikan, baik formal, informal, maupun nonformal. Dengan upaya-upaya inilah barangkali kasus-kasus moral di negara kita bisa diminimalisasi, meskipun butuh waktu dan proses yang panjang.

Pendahuluan

Kita sudah beberapa tahun memasuki milenium baru, yakni milenium ketiga. Sebelum memasuki milenium sekarang ini, banyak orang yang cemas dan khawatir dengan ketidakpastian yang bakal terjadi di milenium baru. Berbagai prediksi diberikan oleh para ahli, mulai dari para agamawan, cendekiawan, ilmuwan, hingga tukang ramal yang tentunya prediksi mereka berbeda-beda. Selama enam tahun kita memasuki milenium ketiga ini, sama-sama dapat kita rasakan betapa dunia yang begitu luas

* Penulis adalah dosen tetap Jurusan PKN dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

semakin terasa sempit (mengglobal). Era ini sering juga disebut era globalisasi. Ini terjadi akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya teknologi informasi dan komunikasi (ITC), yang hasilnya sudah dapat dinikmati oleh umat manusia yang tidak terbatas hanya golongan *the have* saja, tetapi oleh semua lapisan.

Perkembangan ITC yang begitu cepat membuat dunia kita sekarang semakin mengglobal. Kita yang berada di Indonesia dengan mudah dapat berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang ada di negara-negara lain. Apa yang terjadi di dunia luar dapat dengan cepat kita saksikan beritanya di tempat kita. Dengan semakin mudahnya kita mengakses berita dan data melalui internet, maka kita semakin mudah dan cepat memperoleh apa yang kita inginkan.

Berbagai aspek kehidupan umat manusia dapat dengan mudah kita lihat melalui berbagai media baik media cetak maupun media elektronika. Dari sini dapat terlihat bahwa sebagian besar negara di dunia sekarang mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Namun, kemajuan di bidang-bidang tersebut justru diiringi dengan kemerosotan dalam bidang agama (iman) dan moral (akhlak). Nilai-nilai agama dan moral semakin mahal harganya dan mulai tercerabut dari pola-pola kehidupan manusia sekarang. Akibatnya, kemajuan di bidang IPTEK, seperti teknologi nuklir, justru dapat membunuh jutaan umat manusia. Ekonomi digunakan sarana untuk membungkam para pesaing lalu mendepakinya dengan menghalalkan segala cara. Politik digunakan sebagai sarana untuk memaksa musuh-musuh politik dan menghalalkan para pesaingnya dengan tipu daya, kebohongan, makar, dan manipulasi. Birokrasi pemerintahan dipenuhi oleh konspirasi, kolusi, dan korupsi.

Pertimbangan agama dan moral dalam bidang politik dan ekonomi kurang begitu lazim. Para pelaku politik dan ekonomi (mungkin di bidang-bidang lainnya) tidak lagi menjadikan agama dan moral sebagai "ruh" yang dapat memberi warna dalam setiap gerak dan langkah mereka. Berbagai kejahatan dan kemunkaran terjadi hampir di setiap jengkal dari permukaan bumi kita sekarang ini. Setiap hari kita dapat menyaksikan berbagai kejahatan dan kemunkaran baik secara langsung maupun melalui berbagai media. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hal ini terjadi? Adakah ada upaya-upaya untuk menghentikannya? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang bisa dikemukakan terkait dengan permasalahan ini.

Itulah persoalan moral yang sudah menggejala dan mengglobal. Di negara kita sendiri, Indonesia, permasalahan moral tidak berbeda dengan apa yang terjadi di dunia pada umumnya. Berbagai permasalahan moral muncul menghiasi berita-berita di koran maupun televisi, misalnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), pelanggaran HAM, pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap wanita, pornografi, pelacuran, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai bentuk tindak kekerasan dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Upaya-upaya untuk memberantas, atau minimal mengurangi, permasalahan tersebut juga sudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tampak menggembirakan. Penambahan para pelaku kejahatan tidak sebanding dengan kasus-kasus kejahatan yang berhasil tertangani, sehingga semakin hari tindak kejahatan semakin bertambah dan semakin meresahkan masyarakat.

Persoalan Moral, Etika, dan Akhlak

Sebelum lebih jauh membahas permasalahan moral di Indonesia dan penanganannya, ada baiknya kita ketahui dulu tiga istilah yang hampir identik terkait

dengan permasalahan yang dikaji di sini, yakni moral, etika, dan akhlak. Istilah moral didefinisikan sebagai (ajaran tentang) baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral juga dimaknai dengan akhlak, budi pekerti, atau susila (KBBI, 2001: 754). Sedang etika didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) (KBBI, 2001: 309). Meskipun definisi dari kedua istilah itu agak berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan, yakni sama-sama terkait dengan nilai baik dan buruk. Karena itu, kedua istilah itu sering disamakan, bahkan keduanya juga diidentikkan dengan akhlak.

Kata akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata *khuluq* berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat (Hamzah Ya'qub, 1988: 11). Secara terminologis, akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Maskawaih. Sedang al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai suatu sifat yang tetap pada jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan kepada pikiran (Rahmat Djatnika, 1996: 27).

Karena posisi akhlak merupakan satu kesatuan utuh dari ajaran Islam, maka akhlak dalam Islam mendasarkan ajaran-ajarannya tentang baik dan buruk, benar dan salah, bersumberkan kepada ajaran Allah. Tolok ukur kelakuan baik dan buruk mestilah merujuk kepada ketentuan Allah. Demikian rumus yang diberikan oleh kebanyakan ulama. Diyakini sepenuhnya bahwa apa yang dinilai baik oleh Allah, pasti baik dalam esensinya. Demikian pula sebaliknya, tidak mungkin Allah akan menilai kebohongan sebagai kelakuan baik, karena kebohongan esensinya adalah buruk.

Oleh karena itu, akhlak dalam Islam menurut Quraish Shihab (1996: 261) tidak dapat disamakan dengan etika atau moral, jika pengertiannya hanya semata menunjuk kepada sopan santun di antara manusia, serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriyah. Akhlak dalam Islam memiliki makna yang lebih luas, yang mencakup beberapa hal yang tidak merupakan sifat lahiriyah. Akhlak Islam berkaitan dengan sikap batin maupun pikiran. Akhlak Islam juga memiliki cakupan yang lebih luas, karena tidak semata mengatur hubungan manusia dengan manusia.

Kembali pada persoalan pokok, bahwa persoalan moral (etika atau akhlak) adalah persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia, dalam segala aspeknya, baik individu maupun sosial, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan manusia dan dirinya, maupun dengan alam sekitar, baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun agama (Musa Asy'arie, 2001: 92). Dalam kehidupan kita sehari-hari selalu terjadi konflik dalam berbagai kehidupan, baik antara individu yang satu dengan individu yang lain, antara individu dengan masyarakat, maupun antara masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain. Konflik ini terjadi biasanya bersumber dari perbedaan kepentingan dan pandangan ideologis yang di dalamnya juga termuat nilai-nilai moral atau etika.

Persoalan moral pada prinsipnya adalah persoalan baik dan buruk. Dalam akhlak Islam tingkah laku atau perangai yang berkategori baik disebut *akhlaq mahmudah* dan yang berkategori buruk disebut *akhlaq madzmumah*. Meskipun baik dan buruk ini berbeda-beda nilai, ukuran, atau caranya di suatu tempat dengan tempat yang lainnya, namun pada hakikatnya baik dan buruk itu bersifat universal dan absolut. Misalnya, menghormati ibu itu baik, sedang membunuh bayi itu buruk (jahat). Contoh ini berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Akan tetapi, dilihat dari segi aplikasi

nilai-nilai etika dalam realitas kehidupan bisa saja terjadi perbedaan-perbedaan. Membunuh bayi bisa saja berubah nilainya jika dikaitkan dengan tindak penyelamatan ibunya yang tidak ada cara lainnya selain membunuh bayi tersebut.

Al-Quran membagi sifat-sifat manusia menjadi dua kelompok yang sama sekali bertentangan, yang menurut kenyataan sifat-sifat tersebut sangat bertentangan dan sangat konkret, dan menurut semantik terlampau sarat dengan apa yang disebut baik dan buruk atau benar dan salah. Dua sifat itu tercermin dalam bentuk perilaku yang positif (akhlak mulia) dan perilaku yang negatif (akhlak tercela). Ukuran yang paling pokok untuk membedakan perilaku ini adalah masalah keimanan (kepercayaan) kepada Allah, Pencipta seluruh makhluk. Dalam al-Quran terdapat pokok pikiran yang bersifat dualisme berkenaan dengan nilai moral manusia, yakni dualisme asasi bagi orang yang beriman dan bagi orang yang tidak beriman. Dalam hal ini akhlak Islam merupakan struktur yang sangat sederhana, karena dengan ukuran akhirnya, yakni keimanan, seseorang dapat dengan mudah menentukan yang manakah dari dua kelompok sifat itu yang dimiliki oleh sebuah perbuatan atau oleh seseorang (Izutsu, 1993: 128).

Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang konsep baik dan buruk dalam berbagai variasi dan keadaan. Untuk menggambarkan masalah kebaikan, al-Quran menggunakan term-term seperti *shalih*, yang berarti baik atau kebaikan dan kata *sayyiah* yang berarti jelek atau buruk (QS. al-'Ashr (103): 3). Kata lain yang digunakan untuk menyebut kebaikan adalah *birr* (QS. al-Baqarah (2): 177). Dalam hal ini *birr* identik dengan takwa. Kata lain yang hampir sama dengan *birr* adalah *qisth* (adil) yang diperlawankan dengan *zhulm* (aniaya). Kata lain yang menunjukkan keburukan adalah *fasad* yang merupakan kata yang sangat komprehensif yang mampu menunjukkan semua jenis pekerjaan yang buruk (Izutsu, 1993: 255). Al-Quran juga menggunakan kata *ma'ruf* dan

munkar untuk menunjukkan baik dan buruk. Selain kata *munkar* al-Quran juga menggunakan kata *fahsya'* atau *fahisyah* untuk menyebut keburukan. Di samping itu, al-Quran juga menggunakan kata *khair* untuk menyebut kebaikan dan *kata syarr* untuk menyebut keburukan. Kata lain yang berarti kebaikan adalah *hasan*, *hasanah*, atau *ahsan* yang dilawankan dengan *sayyi'ah* atau *su'* yang berarti buruk atau jelek. Al-Quran juga menggunakan kata *thayyib* untuk menyebut kebaikan dan *khabits* untuk menyebut keburukan (kotoran). Akhirnya, al-Quran juga menggunakan kata *halal* dan *haram* untuk menunjuk adanya kebaikan dan keburukan.

Berbagai Kasus Moral di Indonesia

Negara kita sekarang ini sudah terkenal di dunia sebagai negara yang paling terkorup tetapi yang paling sedikit koruptornya tertangkap. Di dunia internasional negara kita juga dikenal sebagai negara yang tidak menghargai Hak Asasi Manusia. Para korban G 30 S PKI 1965 dan para eks-tapol beserta keluarga dan sanak-saudara mereka masih juga belum mendapat perlakuan yang adil, walaupun 40 tahun lebih sudah berlalu sejak rejim militer Soeharto melakukan berbagai kebiadaban yang keterlaluan itu. Sementara itu, Indonesia juga sudah terkenal di dunia sebagai negara yang menjadi sarang teroris. Berbagai kasus yang berbau terorisme akhir-akhir ini sering terjadi di berbagai tempat di negara kita dengan menyalahgunakan nama agama (baca: Islam).

Sesudah jatuhnya Soeharto sebagai presiden tahun 1998, dan kemudian digantikan berturut-turut oleh Habibie, Gus Dur, Megawati, dan sekarang SBY - Jusuf Kalla, keadaan politik, ekonomi, dan sosial negara kita tidak mengalami perubahan besar atau tidak meraih perbaikan fundamental bagi kehidupan rakyat banyak. Bahkan sebaliknya, banyak tanda-tanda yang menunjukkan, bahwa keadaan pada umumnya

malahan merosot atau mundur, kalau pun tidak dikatakan mandeg. Yang menyedihkan sekali, ialah tidak adanya perspektif - dalam jangka dekat - tentang akan terjadinya perbaikan yang radikal bagi kehidupan sebagian besar rakyat, apakah setahun lagi, lima tahun lagi, atau lima belas tahun lagi.

Kalau melihat banyaknya persoalan-persoalan rumit yang tak kunjung bisa diselesaikan seperti di atas, ditambah lagi dengan menumpuknya kesulitan-kesulitan baru akibat krisis moneter dan krisis politik yang juga berakibat pada krisis moral, maka masuk akal kalau ada orang yang sudah putus asa terhadap masa depan bangsa kita ini. Pemerintah tampaknya kurang serius dalam menangani berbagai kasus yang ada, terutama kasus-kasus besar seperti korupsi dan yang sejenisnya.

Di samping itu, dalam pelaksanaan desentralisasi kekuasaan dalam rangka otonomi daerah, di banyak DPRD terjadi juga "desentralisasi korupsi". Korupsi besar dan kecil, dewasa ini merupakan penyakit yang parah di daerah. Korupsi terbesar di Indonesia tahun 2004 dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disusul kepala daerah, aparat pemerintah daerah, direktur badan usaha milik daerah, serta pimpinan proyek. Dari 432 kasus korupsi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun 2004, sebagian besar dilakukan oleh DPRD. Demikian catatan *Indonesia Corruption Watch* (Kompas, 18 Februari 2005)

Jadi, korupsi tidak hanya banyak terjadi di ibukota Jakarta saja, melainkan juga sudah melanda di daerah-daerah secara parah. Ini berarti, bahwa di negara kita memang sedang berkuasa banyak pejabat yang menjadi penjahat, yang menyelip di berbagai bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan kalau kita teliti benar-benar riwayat hidup mereka, maka akan nyatalah bahwa kebanyakan koruptor yang merajalela di Jakarta dan daerah-daerah ini terjadi pada masa Orde Baru yang dilakukan oleh orang-

orang Golkar atau pendukung rejim Soeharto, dan kebanyakan koruptor ini adalah orang-orang terkemuka yang umumnya sudah kaya-raja. Jadi mereka melakukan korupsi bukan karena kebutuhan hidup sehari-hari yang mendesak, melainkan karena kerakusan yang bersumber pada rendahnya moral.

Sejarah Orde Baru sudah membuktikan bahwa moral atau mentalitas para tokoh pendukung utamanya (walaupun tidak semuanya) tidaklah bisa digolongkan luhur dalam menghadapi kepentingan rakyat dan negara. Seperti sudah disaksikan oleh banyak orang selama ini, sistem politik dan pemerintahan Orde Baru (yang intinya adalah golongan TNI-AD dan Golkar) bukan hanya represif atau otoriter saja tetapi juga korup. Sebagai akibat dari berbagai kejahatan, kemaksiatan, dan pelanggaran yang dilakukan selama lebih dari 32 tahun, bolehlah kiranya dikatakan bahwa generasi Orde Baru adalah satu generasi bangsa Indonesia (sudah tentu saja, tidak seluruhnya) yang paling busuk dalam sejarah bangsa kita. Generasi Orde Baru telah merusak apa saja yang luhur dari bangsa Indonesia dan juga apa saja yang terbaik dari republik ini. Ini sudah dibuktikan di masa lalu, di masa kini, dan juga akan lebih gamblang lagi di masa yang akan datang.

Apa yang dialami bangsa Indonesia selama Orde Baru berkuasa (yang sebagian masih diteruskan sampai sekarang) ialah indoktrinasi reaksioner dan anti-rakyat, pemalsuan sejarah, pengebirian atau pemelacuran Pancasila, dan pelecehan HAM. Dalam buku sejarah yang akan dibaca oleh anak-cucu kita di kemudian hari perlu juga dicatat bahwa karena Orde Barulah maka bangsa Indonesia menghadapi pembusukan moral dan kebejatan iman secara parah dan besar-besaran, seperti yang bisa kita saksikan sekarang ini di mana-mana di negeri kita.

Karena pembusukan moral dan kebejatan iman ini sudah begitu parah, dan sudah meluas ke mana-mana, maka wajarlah jika Presiden SBY menyatakan bahwa Indonesia memerlukan waktu sekitar 15 tahun untuk menciptakan kehidupan yang bersih dari praktik-praktik korupsi. Bahkan, kalau melihat terjadinya pembusukan-pembusukan di Mahkamah Agung, di Kejaksaan Agung, di Mabes Polri, dan berbagai instansi negara lainnya, maka dalam 15 tahun pun masih belum pasti pemberantasan korupsi akan berhasil.

Presiden SBY, ketika memulai pemerintahannya, mendengungkan antara lain semboyan pemberantasan korupsi. Karena menyadari juga bahwa masyarakat sudah betul-betul muak, jenuh dengan praktik korupsi yang terjadi di dalam masyarakat kita. Terutama di kalangan elitnya, sehingga dengan tepat (barangkali) dinyatakanlah bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya. Maksudnya sudah terstruktur dan menjadi biasa melakukan tindak korupsi. Orang yang tidak melakukannya dianggap aneh, bahkan bisa diisolasi. Seseorang yang berani buka mulut apalagi melaporkan pelaku korupsi, maka bisa dipastikan ia akan disingkirkan, atau bahkan diberhentikan.

Korupsi sudah struktural, dari atas sampai ke kelurahan dan kampung, dan sudah menjadi sebagian dari kebudayaan Indonesia. Kenyataan sekarang membuktikan hal itu. Mungkin terlalu sederhana dan gampang untuk menyatakan bahwa seluruh budaya Indonesia sudah kejangkitan korupsi. Nyatanya, di negeri kita tercinta ini, dalam masa Orde Baru budaya korupsi mencapai "prestasi" puncaknya, sekaligus merupakan kejahatan besarnya dalam sejarah Indonesia. Di era reformasi ini pun budaya ini semakin jelas, yang semula dilakukan secara individual sekarang dilakukan secara berjamaah (struktural).

Alternatif Penanganan Kasus Moral di Indonesia

Penanganan koruptor dewasa ini lebih banyak dibandingkan dengan yang sebelumnya, tetapi koruptor-koruptor kelas "kakap" seperti dinasti Cendana dengan Jendral Soeharto sebagai komandannya nyatanya tidak dilanjutkan perkaranya. Begitu juga halnya penanganan terhadap para petinggi dan jendral-jendral yang bergelimang korupsi selama puluhan tahun yang masih bebas menikmati hasil korupsinya selama puluhan tahun ini. Di sisi lain, di tengah-tengah masyarakat juga muncul kasus lain yang juga tidak kalah pentingnya terkait dengan permasalahan moral, yakni kasus pornografi dan pornoaksi. Begitu besarnya akibat yang ditimbulkan oleh pornografi dan pornoaksi ini hingga pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan undang-undang yang mengatur masalah tersebut.

Sebenarnya banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat kita dalam menangani kasus-kasus moral yang merebak di tengah masyarakat. Namun demikian, hasilnya masih jauh dari apa yang diharapkan, bukan kasus-kasus itu menjadi berkurang, tetapi malah semakin bertambah. Kekurangtegasan aparat yang berwajib dalam menangani kasus-kasus tersebut merupakan salah satu penyebab gagalnya upaya tersebut.

Dalam menghadapi banyaknya masalah besar bangsa dan merosotnya moral bangsa dewasa ini, terasa sekali kebutuhan adanya tokoh besar bangsa, yang bisa menjadi panutan sebagian terbesar rakyat, yang berwibawa, yang memiliki integritas yang tinggi, yang betul-betul bisa mempersatukan seluruh bangsa yang majemuk ini. Kita memerlukan adanya kepemimpinan yang berbobot, yang betul-betul mampu melaksanakan amanah dalam mengemban tugas-tugas kenegaraan dalam memakmurkan dan mensejahterakan bangsa. Pemimpin seperti inilah yang diharapkan dapat memupuk

moral bangsa untuk mencintai tanah air, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, serta melakukan penegakan hukum demi terciptanya keadilan untuk semua orang.

Bagi umat Islam, perlu kiranya meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Saw. Apa yang ia perintahkan kepada umatnya pastilah lebih dahulu dikerjakannya, dan apa yang ia larang untuk dilakukan umatnya pastilah tidak dilakukannya. Dengan demikian, beliau benar-benar menjadi teladan bagi umatnya dalam berbagai bidang kehidupan. Dan memang tugas utama kehadiran beliau di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia di tengah-tengah kehidupan manusia.

Untuk menangani berbagai kasus moral dan kemerosotan iman di negeri ini, yang merupakan sumber utama dari segala kesulitan dan krisis yang multidimensional, diperlukan adanya gerakan besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa kita. Kita tidak boleh hanya mempercayakan penanganan soal pemberantasan korupsi yang begitu serius ini hanya kepada tokoh-tokoh di eksekutif, legislatif, dan yudikatif saja (atau, kepada aparat-aparat negara saja), karena sudah terbukti selama ini bahwa justru mereka pun harus dijadikan sasaran gerakan. Dalam gerakan ini perlu diikutsertakan sebanyak mungkin golongan atau kalangan dalam masyarakat, baik yang tergabung dalam partai-partai politik, organisasi massa, LSM maupun perkumpulan-perkumpulan lainnya.

Dalam gerakan besar-besaran melawan korupsi ini, penting sekali ikut sertanya secara aktif kalangan Islam, terutama tokoh-tokohnya, karena mereka merupakan penduduk mayoritas di republik ini. Peran aktif dari lembaga-lembaga Islam seperti majlis ulama Indonesia, organisasi massa Islam, dan partai politik Islam sangat diperlukan untuk memberikan *moral force* kepada umat Islam yang merupakan bagian

terbesar dari jumlah penduduk. Apa yang sudah dilakukan hingga sekarang ini masih perlu ditingkatkan lagi.

Dalam gerakan moral melawan korupsi atau kejahatan moral lainnya, akan baik bagi rakyat Indonesia jika golongan Islam lebih menggalakkan gerakannya, umpamanya dengan menjadikan perlawanan terhadap kasus-kasus moral itu sebagai jihad. Dengan begitu, sasaran gerakan moral ini menjadi lebih jelas, manfaatnya juga besar sekali. Sebab, tidak dapat diingkari, bahwa sebagian terbesar dari orang-orang yang melakukan kejahatan moral itu adalah para pemeluk Islam. Dalam kasus korupsi misalnya, banyak di antara koruptor-koruptor kelas "kakap" yang - tidak malu-malu dan juga tidak takut-takut - mengucapkan sumpah jabatan di bawah al-Quran. Banyak juga di antara mereka yang rajin sembahyang lima waktu, berpuasa, dan bahkan berpredikat haji.

Alternatif lain yang juga efektif dalam menahan laju dekadensi moral bangsa kita adalah melalui pendidikan, baik pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Dalam pendidikan formal, para peserta didik mulai dari tingkat dasar dan menengah hingga tingkat tinggi harus diberikan pencerahan dengan memberikan bekal kepada mereka ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari nilai-nilai agama dan akhlak mulia. Mereka sejak dini dibiasakan untuk beragama dengan baik dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Mereka diajak untuk menjalankan perintah-perintah agama, berkata jujur dan tidak bohong, disiplin, sopan santun, toleran, saling mencintai, berbuat baik dengan sesama, malu berbuat jahat, tidak irihati, tidak berbuat aniaya, tidak rakus, tidak menipu, tidak pendendam, tidak mengadu domba, tidak ambisius, dan lain sebagainya. Pendidikan formal seperti itu harus diiringi dengan pendidikan informal dan nonformal yang sejalan. Keluarga harus memberikan lingkungan yang kondusif yang dapat mendukung dan memotivasi anak demi terbinanya akhlak mulia.

Begitu juga masyarakat harus memberikan pelajaran yang baik kepada anak-anak sehingga mereka tidak dibingungkan oleh masyarakatnya sendiri. Kebingungan sering terjadi ketika apa yang didapatkan oleh anak didik di masyarakat jauh berbeda dengan apa yang diajarkan di sekolah. Akibatnya, anak tidak dapat melakukan internalisasi nilai-nilai yang diperolehnya di sekolah. Sebaliknya, anak justru menjadi putus asa dan bersikap semaunya. Inilah yang menjadi hambatan terealisasinya nilai-nilai akhlak mulia.

Pendidikan yang baik dan berkualitas akan menjamin terbinanya insan-insan yang religius dan berbudi pekerti luhur serta memiliki kecerdasan sesuai dengan bidang-bidang yang ditekuni. Hal ini dapat dilihat juga dalam tujuan pendidikan nasional kita, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal (3) Undang-undang No. 20 th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pendidikan tidak begitu saja menghasilkan sumber daya manusia seperti itu, tetapi butuh waktu dan proses yang panjang. Dengan komitmen yang jelas dan tegas dari pemerintah untuk melaksanakan isi undang-undang tersebut, hal itu akan terealisasi dengan baik. Dengan demikian, melalui pendidikan inilah kita dapat menyiapkan para pemimpin bangsa yang memiliki iman yang kokoh dan budi pekerti yang luhur serta mampu menjadi pengawal moral dalam membawa negara dan bangsa kita di masa-masa yang akan datang.

Itulah beberapa alternatif yang bisa diupayakan untuk menangani kasus-kasus moral di Indonesia. Tentu saja masih banyak alternatif lain yang bisa dilakukan. Yang pasti untuk melakukan upaya-upaya itu bukanlah hal yang mudah dan yang pasti

banyak tantangannya. Karena itu, dengan niat yang ikhlas dan komitmen yang kuat untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, serta selalu bertawakkal kepada Allah, marilah kita bersama-sama menangani kasus-kasus moral di negeri ini mulai dari tingkatan yang terkecil hingga yang terbesar.

Penutup

Sebagai akhir dari tulisan ini, perlu direnungkan kembali bahwa permasalahan moral bukanlah permasalahan orang atau bangsa lain, tetapi permasalahan kita semua. Sebagai bangsa yang baik yang juga memegang teguh nilai-nilai agama, tidaklah patut jika kita hanya berpangku tangan melihat kejahatan moral yang kian hari kian bertambah, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kita harus melakukan penanganan terhadap kasus-kasus moral ini sesuai dengan tugas dan kapasitas kita masing-masing. Mulailah dari diri kita masing-masing, lalu terhadap orang-orang yang terdekat dengan kita hingga orang-orang lain yang jauh dengan kita. Kita berdoa kepada Allah Swt. mudah-mudahan bangsa dan negara kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Hamzah Ya'qub. (1988). *Etika Islam: Pembinaan Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar)*. Bandung: CV Diponegoro. Cet. IV.

Izutsu, Toshihiko. 1993. *Konsep-konsep Etika Religius dalam Qur'an*. Terj. oleh Agus Fahri Husein dkk. Yogyakarta: Tiawa Wacana.

Kompas, 18 Februari 2005.

Musa Asy'arie. 2001. *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berpikir*. Yogyakarta: LESFI. Cet. II.

Rachmat Djatnika. 1996. *Sistem Etika Islami (Ahlak Mulia)*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. Cet. I.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Cet. Pertama Edisi III.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sumber dari Internet

Nelson Alwi. *Sewindu Reformasi: Problematika dan Agama*. <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=144837>.

Ibrahim Isa. *Sekitar Kriteria Moral, "Playboy", Korupsi dan Eksuksi Ekstra Judisial pada Peristiwa 1965*. http://groups.google.com/group/budaya_tionghoa/browse/thread.

Generasi Orde Baru adalah Generasi Busuk Bangsa. <http://groups.google.com/group/smokingcorner/msg>.

Biodata Penulis

Marzuki, dilahirkan di Banyuwangi, 21 April 1966. Menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1990. Kemudian menyelesaikan studi S-2 bidang Pengkajian Islam di Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1997. Sejak tahun 1992 menjadi dosen tetap Jurusan PPKN (sekarang PKN dan Hukum), FISE, Universitas Negeri Yogyakarta dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan Hukum Islam. Tulisan yang dihasilkan banyak terkait dengan permasalahan hukum, khususnya hukum Islam, pendidikan Islam, dan gender dalam perspektif Islam.